RENCANA KERJA KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN NGORO
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngoro 16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. . Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 33
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 34
5.3 Rencana Tindak Lanjut 34

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Ngoro merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Ngoro yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Ngoro adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2025 – 2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja SKPD

   Tahapan persiapan penyusunan Renja antara lain pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusuna agenda kerja, serta pengumpulan data dan informasi.

b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD

   1. Tahap Perumusan Renja

      Perumusan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD, pembahasan forum SKPD, serta penyesuaian dokumen Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja

   Penyajian Renja dapat disusun menurut sistimatika yang ada.

c. Pelaksanaan Forum SKPD

   Forum SKPD merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja SKPD.

d. Penetapan Renja SKPD

   Penetapan Renja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran tersebut.

Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L dan Renja Provinsi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen RKPD

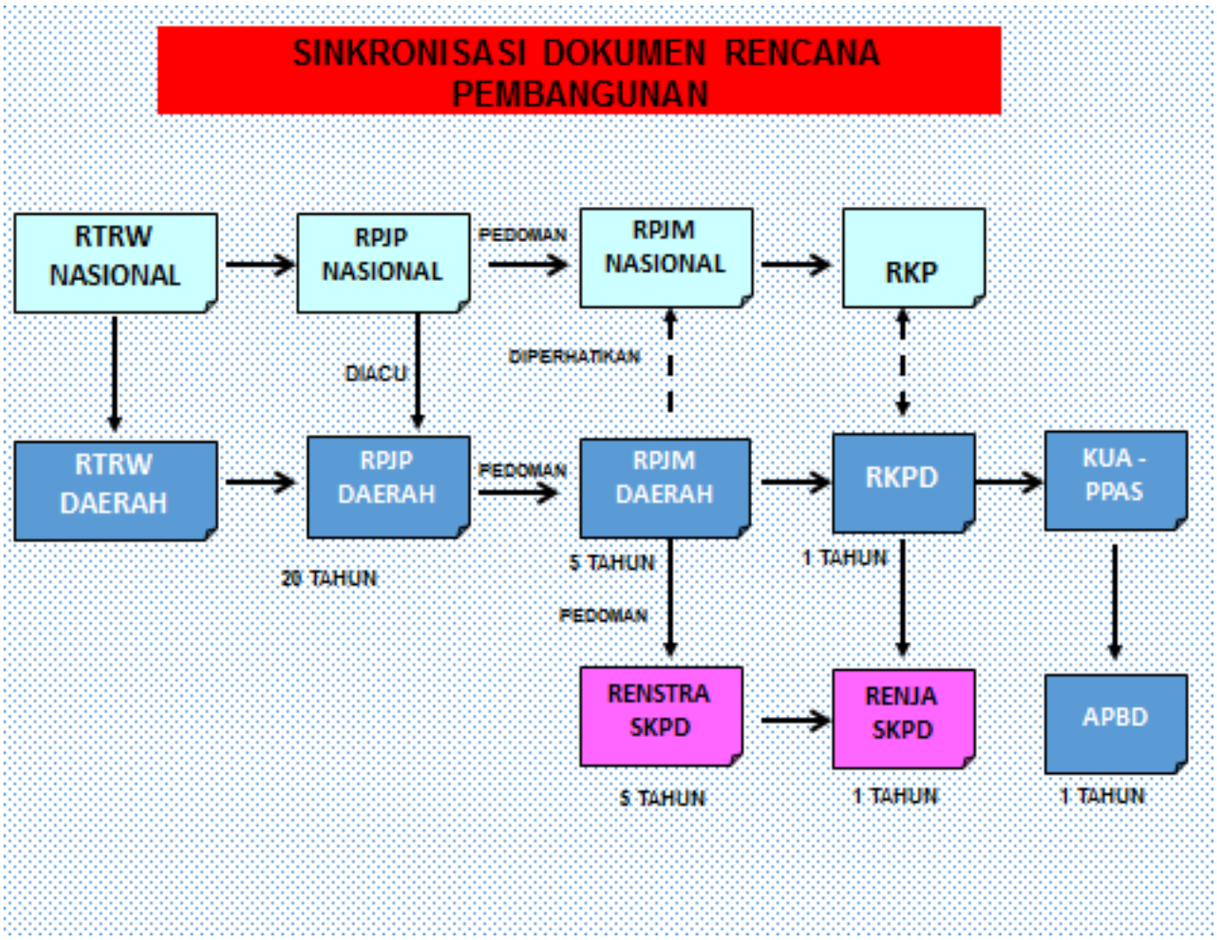

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Ngoro yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Ngoro.

RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Kegiatan awal penyusunan Rancangan APBD dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program- program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati maka Pemerintah Daerah menyusun PPAS dengan tahapan sebagai berikut :

a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
b. Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan;
c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Dari KUA dan PPAS yang telah disusun akan diperoleh nota kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memuat tentang aktivitas dalam

penyusunan APBD. RKA-SKPD ini dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah sehingga sifatnya adalah usulan dengan menggunakan PPAS sebagai acuannya. Usulan- usulan ini akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya dievaluasi dan diseleksi menjadi RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang -undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : "Renstra-Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif";
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 4)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Ngoro sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Ngoro ini secara garis besar

disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Kecamatan Sooko dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya.Sajian Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan Uraian Mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sooko permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD Berisikan Uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
b. Lokasi program/kegiatan
c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
d. Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannnya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah." Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Ngoro pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Realisasi Belanja pada Kecamatan Ngoro Tahun 2024

NO	OPD/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.500.000,00**	**12.499.200,00**	**99,99%**	**800,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.499.500,00	99,99%	500,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.999.700,00	99,99%	300,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.091.073.000,00**	**2.006.572.341,00**	**95,96%**	**84.500.659,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.073.000,00	2.006.572.341,00	95,96%	84.500.659,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**140.749.880,00**	**139.443.385,00**	**99,31%**	**1.306.495,00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.995.350,00	99,95%	4.650,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.904.200,00	25.820.500,00	95,97%	1.083.700,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.991.000,00	99,96%	9.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.999.800,00	100,00%	200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.528.000,00	3.528.000,00	100,00%	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	26.217.680,00	26.078.735,00	99,47%	138.945,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.100.000,00	39.030.000,00	99,82%	70.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**124.400.000,00**	**116.752.247,00**	**94,06%**	**7.647.753,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.400.000,00	56.752.327,00	88,12%	7.647.673,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000,00	59.999.920,00	100,00%	80,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**83.050.120,00**	**83.010.250,00**	**99,93%**	**39.870,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.050.120,00	51.030.350,00	99,96%	19.770,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	11.980.000,00	99,83%	20.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.999.900,00	100,00%	100,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**20.000.000,00**	**19.969.700,00**	**99,85%**	**30.300,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**20.000.000,00**	**19.969.700,00**	**99,85%**	**30.300,00**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000,00	19.969.700,00	99,85%	30.300,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**166.540.000,00**	**166.015.910,00**	**99,54%**	**524.090,00**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**166.540.000,00**	**166.015.910,00**	**99,54%**	**524.090,00**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.720.000,00	16.520.000,00	98,80%	200.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.020.000,00	22.016.750,00	99,99%	3.250,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.020.000,00	24.919.900,00	99,60%	100.100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	102.780.000,00	102.559.260,00	99,79%	220.740,00
	JUMLAH	**2.638.313.000,00**	**2.544.263.033,00**	**96,44%**	**94.049.967,00**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran pada Kecamatan Ngoro cukup baik yaitu 96,44% atau sebesar Rp. 2.544.263.033,00 dari total pagu Rp 2.638.313.000,00. Terdapat silpa sebesar Rp. 94.049.967,00. Sisa anggaran yang tidak terserap dengan maksimal disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya pegawai yang pensiun serta terkena disiplin ASN
2. Adanya selisih harga nego pejabat pengadaan dan DPA dari belanja yang menggunakan metode *e-purchasing*
3. Penyerapan anggaran sesuai penggunaan (Listrik)

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Ngoro

Kode							Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2023	
											Target Renja Perangkat Daerah sd 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah sd 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
							Bidang Administrasi Pemerintahan									
4	**01**	**4**	**01**	**20**	**06**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**
4	01	4	01	20	06	05		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80,53**	**78,30**	**79,73**	**80,19**	**100%**	**79,07**	**79,69**	**100%**
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	NA	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
1	05	4	01	20	16	25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	NA	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	100%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase realisasi anggaran perangkat daerah**	**89%**	**81,13%**	**90%**	**93,73%**	**102%**	**90%**	**93,52%**	**102%**
2	**07**	**4**	**01**	**20**	**15**		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	NA	25 orang/bulan	21 orang/bulan	100%	17 orang/bulan	17 orang/bulan	100%

2	07	4	01	20	15	01	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IP ASN Perangkat Daerah**	**78**	**44,39**	**81**	**71,37**	**88,11%**	**75**	**75**	**100%**
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	07	4	01	20	15	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	NA	21 orang	21 orang	100%	NA	NA	NA
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan**	**94%**	**85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**07**	**4**	**01**	**20**	**16**		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	4	01	20	16	08	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	8 paket	8 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
4	01	4	01	20	55		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
4	01	4	01	20	55	01	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
							Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan**	**94 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**94%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	NA	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**Presentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**1.250 Pelayanan**	**400 pelayanan**	**1.000 pelayanan**	**4.479 pelayanan**	**447,90%**	**1.110 pelayanan**	**1.210 pelayanan**	**109%**
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada	19 Laporan	NA	19 Laporan	19 Laporan	100%	19 Laporan	19 Laporan	100%

								Urusan Pemerintahan								
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahn Desa	**Presentase hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
							Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan fasilitas koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**19 fasilitasi**	**NA**	**52 Fasilitasi**	**52 Fasilitasi**	**100%**	**52 Fasilitasi**	**52 Fasilitasi**	**100%**
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahanh Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	NA	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
							Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	NA	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
							Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	NA	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
							Fasiltasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	NA	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngoro
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan	-	-		95	95,25	95,50	94,75	-	95,25	95,50	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngoro

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ngoro tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Ngoro dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal. Isu-isu penting penyelengaraan dan fungsi Kecamatan Ngoro diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Ngoro

- **Faktor Kekuatan Organisasi**
  - Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
  - Aparat Kantor Kecamatan Ngoro bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
  - Pola kerja di Kantor kecamatan Ngoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
  - Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
  - Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Ngoro;

- Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi
  - Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
  - Belum memadainya kompetensi beberapa SDM yang ada ;
  - Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi ;
  - Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas ;
  - Kurang meratanya pembagian kegiatan yang berhubungan langsung dengan kinerja selaku perangkat daerah dan yang tidak berhubungan dengan kinerja selaku perangkat daerah hingga berdampak pada kurang maksimalnya peran Kecamatan Ngoro terhadap perwujudan pencapaian visi dan misi daerah ;
  - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja ;
  - Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ;
  - Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Kondisi Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Ngoro namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi
  - Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata;
  - Tingginya peluang pasar ;
  - Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja

dan pelayanan yang nyaman dan kondusif ;

- Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.

- Faktor Tantangan Organisasi
  - Masih kurang memadainya sarana dan prasarana ;
  - Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan ;
  - Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat ;
  - Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan ;
  - Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi intansi pemerintah;
  - Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
  - Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang;
  - Peningkatan Kinerja melalui Inovasi dan Penerapan E-Office

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Ngoro yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Ngoro untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review terhadap RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2026 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 31)
Review terhadap Rancangan RKPD
Kecamatan Ngoro
Kabupaten Mojokerto

NO	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec Ngoro**	**1. Nilai SAKIP**	**82,76**	**2.449.574.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec Ngoro**	**1. Nilai SAKIP**	**82,76**	**2.449.574.000**	
			2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	**1 Inovasi**				**2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**1 Inovasi**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec Ngoro**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**12.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec Ngoro**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**12.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Ngoro	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Ngoro	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec Ngoro**	**Persentase Realisasi Anggaran**	**95%**	**2.183.624.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec Ngoro**	**Persentase Realisasi Anggaran**	**95%**	**2.183.624.000**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Ngoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.183.624.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Ngoro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.183.624.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec Ngoro**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan**	**95%**	**67.050.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec Ngoro**	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan**	**95%**	**67.050.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.550.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	25.550.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Ngoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Ngoro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec Ngoro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec Ngoro	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngoro**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan**	**95 %**	**110.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Ngoro**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan**	**95 %**	**110.400.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec Ngoro**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**95 %**	**76.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec Ngoro**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**95 %**	**76.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Ngoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Ngoro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Ngoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Ngoro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Ngoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Ngoro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	18.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec Ngoro**	**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**100%**	**15.780.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec Ngoro**	**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**100%**	**15.780.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec Ngoro**	**Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti**	**100%**	**15.780.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec Ngoro**	**Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti**	**100%**	**15.780.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	15.780.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec Ngoro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Laporan	15.780.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kec Ngoro**	**Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti**	**100%**	**203.270.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec Ngoro**	**Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti**	**100%**	**203.270.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec Ngoro**	**Jumlah Laporan Koordinasi**	**23 Laporan**	**203.270.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec Ngoro**	**Jumlah Laporan Koordinasi**	**23 Laporan**	**203.270.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	24.750.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	8 Dokumen	24.750.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	25.549.880	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	25.549.880	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	36.050.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	36.050.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	116.920.120	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ngoro	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	116.920.120	
	TOTAL				**2.668.624.000**	**TOTAL**				**2.668.624.000**	

Sumber : Data Kec Ngoro

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu -isu penting dari masing –masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan. Sehingga rincian pada tabel 2.6 (T-C 32) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Ngoro

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ngoro	-	1 Ekor	Hibah Sapi Qurban

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 8 agenda prioritas pembangunan Nasional (Asta Cita) terdiri dari :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) ;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah **Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.** Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 , yaitu : "Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Ngoro, dalam hal ini Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas,selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95,00	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25

Sumber : Renstra 2025 -2029 Kec Ngoro

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Sooko Tahun 2026 mengacu pada Tujuan Kecamatan Sooko yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sooko untuk 5 tahun mendatang yaitu Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah yaitu antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, mencakup kegiatan:
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.3 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				**2.668.624.000**				**4.246.143.773**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Nilai SAKIP**	**Kec Ngoro**	**82,76**	**2.449.574.000**			**82,77**	**3.866.143.773**
		2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		**1 Inovasi**				**1 Inovasi**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**	**Kec Ngoro**	**100%**	**12.500.000**			**100%**	**20.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kec Ngoro	4 Dokumen	7.500.000	DBH		4 Dokumen	12.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kec Ngoro	21 Laporan	5.000.000	DBH		21 Laporan	7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran**	**Kec Ngoro**	**95%**	**2.183.624.000**			**95%**	**2.977.343.773**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Ngoro	15 orang/bulan	2.183.624.000	DAU & PAD		15 orang/bulan	2.977.343.773

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**Kec Ngoro**	**81**	**-**			**81**	**105.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Kec Ngoro	-	-	-		15 paket	75.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Ngoro	-	-	-		15 orang	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan**	**Kec Ngoro**	**95%**	**67.050.000**			**95%**	**205.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kec Ngoro	1 paket	5.000.000	DBH		1 paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kec Ngoro	1 paket	6.000.000	DBH		3 paket	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kec Ngoro	12 paket	25.550.000	DBH		12 paket	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kec Ngoro	1 Paket	8.000.000	DBH		1 paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Kec Ngoro	1 Dokumen	2.500.000	DBH		2 dokumen	5.000.000

	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Kec Ngoro	1 Paket	10.000.000	DBH		1 paket	10.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kec Ngoro	12 Laporan	10.000.000	DBH		12 laporan	35.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan**	**Kec Ngoro**	**-**	**-**	**-**		**95%**	**150.000.000**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (Unit)	Kec Ngoro	-	-	-		3 unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan**	**Kec Ngoro**	**95 %**	**110.400.000**			**95 %**	**110.400.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kec Ngoro	12 Laporan	50.400.000	DBH		12 Laporan	50.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kec Ngoro	12 Laporan	60.000.000	DBH		12 Laporan	60.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Kec Ngoro**	**95 %**	**76.000.000**			**95 %**	**298.400.000**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kec Ngoro	2 Unit	50.000.000	DBH		2 Unit	50.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kec Ngoro	12 Unit	8.000.000	DBH		12 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kec Ngoro	3 Unit	18.000.000	DBH		3 Unit	238.400.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**Kec Ngoro**	**100%**	**15.780.000**			**100%**	**40.000.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti**	**Kec Ngoro**	**100%**	**15.780.000**			**100%**	**40.000.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Kec Ngoro	6 Laporan	15.780.000	DBH		6 Laporan	40.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti**	**Kec Ngoro**	**100%**	**203.270.000**			**100%**	**340.000.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Laporan Koordinasi**	**Kec Ngoro**	**23 Laporan**	**203.270.000**			**23 Laporan**	**340.000.000**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	Kec Ngoro	8 Dokumen	24.750.000	DBH		8 Dokumen	50.000.000

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Kec Ngoro	5 Dokumen	25.549.880	DBH		5 Dokumen	50.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Kec Ngoro	5 Dokumen	36.050.000	DBH		5 Dokumen	90.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	Kec Ngoro	5 Dokumen	116.920.120	DBH		5 Dokumen	150.000.000

Sumber : Data olahan Kec Ngoro 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplist rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut ini :

TABEL 4.1
MATRIK PROGRAN DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA SKPD : KECAMATAN NGORO

No	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	SUMBER DANA	APBD KAB	APBD PROV		USULAN APBN		
			OUTPUT	OUTCOME				(Rp)	SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB / DAK
	7.01	**KECAMATAN**		**IKM Kecamatan**	**95,70**	**Kec. Ngoro**		**2.668.624.000**					
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82,76**	**Kec. Ngoro**		**2.449.574.000**					
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	**Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**	**1 Inovasi**	**Kec. Ngoro**							
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi**		**100%**	**Kec. Ngoro**		**12.500.000**					
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun		4 Dokumen	Kec. Ngoro	DBH	**7.500.000**					
		Rincian :											
		Penyusunan RKA (termasuk rancangan awal renja,rancangan renja,rancangan akhir renja)	*Penyusunan RKA (termasuk rancangan awal renja,rancangan renja,rancangan akhir renja)*		1 Dokumen			4.000.000					
		Penyusunan DPA	*Penyusunan DPA*		1 Dokumen			500.000					
		Penyusunan RKA Perubahan	*Penyusunan RKA Perubahan*		1 Dokumen			2.500.000					
		Penyusunan DPA Perubahan	*Penyusunan DPA Perubahan*		1 Dokumen			500.000					

	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Laporan	Kec. Ngoro	DBH	**5.000.000**					
		Rincian :											
		Penyusunan Dokumen SAKIP	*Jumlah Laporan SAKIP*		1 Laporan			1.100.000					
		Penyusunan Dokumen LKjIP	*Jumlah Laporan LKjIP*		1 Laporan			1.000.000					
		Penyusunan Dokumen LKPD	*Jumlah Laporan LKPD*		1 Laporan			700.000					
		Penyusunan Dokumen Sinergitas Kecamatan	*Jumlah Laporan Sinergitas Kecamatan*		1 Laporan			500.000					
		Penyusunan Dokumen LKPJ	*Jumlah Laporan LKPJ*		1 Laporan			200.000					
		Penyusunan Dokumen LRA	*Jumlah Laporan LRA*		12 Laporan			700.000					
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Triwulan	*Jumlah Laporan Evaluasi Renja Triwulan*		4 Laporan			800.000					
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		95%	Kec. Ngoro		**2.183.624.000**					
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		15 Orang/Bulan	Kec. Ngoro	DAU & PAD	**2.183.624.000**					
		Rincian :											
		Penyediaan Gaji ASN			15 Orang/Bulan		DAU	1.172.438.000					
		Penyediaan Tunjangan ASN			15 Orang/Bulan		PAD	1.011.186.000					
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	IP ASN Perangkat Daerah		81	Kec. Ngoro		-					
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		95%	Kec. Ngoro		**67.050.000**					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1 Paket	Kec. Ngoro	DBH	**5.000.000**					
		Rincian :											

		Lampu , Kabel , Komponen Listrik Lainnya	*1 Paket Pengadaan Komponen Listrik*		1 Paket			5.000.000					
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)		1 Paket	Kec. Ngoro	DBH	**6.000.000**					
		Rincian :											
		CCTV	1 Paket					6.000.000					
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		12 Paket	Kec. Ngoro	DBH	**25.550.000**					
		Rincian :											
		Makanan dan Minuman Rapat	*12 Paket Makanan dan Minuman*					25.550.000					
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		2 paket	Kec. Ngoro	DBH	**8.000.000**					
		Rincian :											
		Fotocopy	1 Paket belanja Fotocopy		1 paket			346.400					
		Cetak Amplop Dinas, Cetak Map Dinas , Cetak Kop Dinas,Banner	*1 Paket Pengadaan Barang Cetakan*		1 paket			7.653.600					
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (dokumen)		1 Dokumen	Kec. Ngoro	DBH	**2.500.000**					
		Rincian :											
		Koran (1)			1 Dokumen			2.500.000					
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		1 Paket	Kec. Ngoro	DBH	**10.000.000**					
		Rincian :											
		ATK	1 Paket Pengadaan Alat Tulis Kantor		*1 Paket*			10.000.000					
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		12 Laporan	Kec. Ngoro	DBH	**10.000.000**					
		Rincian :											
		SPPD			12 Laporan			10.000.000					

	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		**95%**	Kec. Ngoro		**110.400.000**					
	7.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)		12 Laporan	Kec. Ngoro	DBH	**50.400.000**					
		Rincian :											
		Listrik Kantor			12 Laporan			50.400.000					
		Kebutuhan Telepon			-			-					
	7.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12 Laporan	Kec. Ngoro	DBH	**60.000.000**					
		Rincian :											
		Tenaga Administrasi Kantor (4 orang)	*12 Laporan*		12 Laporan			60.000.000					
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		**95%**			**76.000.000**					
	7.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)		2 Unit	Kec. Ngoro	DBH	**50.000.000**					
		Rincian :											
		Pajak ,			2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)			1.505.000					
		BBM			2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)			38.745.000					
		Service Kendaraan Dinas			2 Unit (1 Mobil dan 1 Motor)			9.750.000					
	7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)		15 unit	Kec. Ngoro	DBH	**8.000.000**					
		Rincian :											
		Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll			12 unit			8.000.000					

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)		3 Unit	Kec. Ngoro	DBH	**18.000.000**					
		Rincian :											
		Pemeliharaan Gedung			1 Unit			14.000.000					
		Pemeliharaan Pendopo			1 Unit			2.000.000					
		Pemeliharaan Rumah Dinas			1 Unit			2.000.000					
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**100%**	**Kec. Ngoro**		**15.780.000**					
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti		100%	Kec. Ngoro		**15.780.000**					
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		6 Laporan	Kec. Ngoro	DBH	**15.780.000**					
		Rincian :											
		SKM (mendukung Program Bupati pada Misi 3)	*Laporan SKM (E-Sukma) Per Tahun*		1 Laporan			10.000.000					
		Pelayanan PATEN	*Laporan PATEN triwulan*		4 Laporan			780.000					
		Laporan FKP	*Laporan Forum Konsultasi Publik*		1 Laporan			5.000.000					
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**	**100%**	**Kec. Ngoro**		**203.270.000**					
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah laporan koordinasi		23 Dokumen	Kec. Ngoro		**203.270.000**					
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka		8 Dokumen	Kec. Ngoro	DBH	**24.750.000**					

			Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)										
		Rincian :											
		Asistensi Penyusunan LPJ	*1 DokumenTahunan*					2.500.000					
		Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	*1 DokumenTahunan*					2.500.000					
		Asistensi Penyusunan Produk Hukum Desa	*1 DokumenTahunan*					2.500.000					
		Asistensi Penatausahaan Desa	*1 DokumenTahunan*					2.500.000					
		Asistensi Perubahan APBDes	*1 DokumenTahunan*					4.000.000					
		Asistensi Penyusunan APBDes	*1 DokumenTahunan*					4.000.000					
		Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	*1 DokumenTahunan*					4.250.000					
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pemerintahan	*1 DokumenTahunan*					2.500.000					
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		5 Dokumen	Kec. Ngoro	DBH	**25.549.880**					
		Rincian :											
		MusDes + Musrenbang RKPD 2026 Kecamatan	*2 Dokumen*					21.049.880					
		Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa	*1 Dokumen*					1.000.000					
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	*1 Dokumen*					1.000.000					
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa	*1 Dokumen*					2.500.000					
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)		5 Dokumen	Kec. Ngoro	DBH	**36.050.000**					
		Rincian :											
		Honorarium Tim Pelaksana Pembinaan	*1 Dokumen*					18.000.000					

		Keamanan dan Ketertiban Masyarakat											
		Pembinaan Satlinmas	*1 Dokumen*					5.000.000					
		Pemantauan dan Pengamanan Wilayah	*1 Dokumen*					5.000.000					
		Penertiban dan Penegakan Perda	*1 Dokumen*					2.500.000					
		Fasilitasi PHBN	*1 Dokumen*					5.550.000					
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)		5 Dokumen	Kec. Ngoro	DBH	**116.920.120**					
		Rincian :											
		Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat*		*1 Dokumen*			5.000.000					
		Pelaksanaan Hibah Sapi	*Jumlah Dokumen*		*1 Dokumen*			42.000.000					
		Fasilitasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (LPM,PKK,Posyandu,Kartar,RT RW) ,	*Jumlah Dokumen*		*1 Dokumen*			24.920.120					
		Fasilitasi kegiatan tematik : KLA,Kab Sehat,Pengarus Utamaan Gender , Stunting, penanggulangan kemiskinan	*Jumlah Dokumen*		*1 Dokumen*			40.000.000					
		Fasilitasi Bantuan Sosial	*Jumlah Dokumen*		*1 Dokumen*			5.000.000					

Sumber data : Kecamatan Ngoro 2025

BAB V

P E N U T U P

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngoro, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Sooko, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Ngoro, Juli 2025

CAMAT NGORO



SATRIYO WAHYU UTOMO,S.IP,M.Si

Pembina

NIP. 19880618 200701 1001